

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Dokumen ini memuat Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 2 September 2026 setelah fraksi mencermati Raperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan perhatian terhadap rencana penurunan anggaran pada kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual, dari semula Rp15.984.000.000,00 menjadi Rp11.723.293.000,00. Fraksi menilai bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan perlu menempatkan penguatan kualitas sumber daya manusia serta pembinaan mental spiritual sebagai pilar penting. Karena itu, fraksi meminta Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen untuk memulihkan alokasi kegiatan pembinaan mental spiritual atau menutup kekurangannya melalui realokasi belanja efisiensi dari sektor lain yang kurang mendesak. Fraksi juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan sinergi, regulasi, dan keberlanjutan alokasi anggaran bagi PMI Kebumen, khususnya untuk layanan donor darah, mitigasi bencana, dan pembinaan relawan muda hingga pelosok daerah.

Pokok pandangan lainnya mencakup pencermatan terhadap kenaikan belanja daerah sebesar Rp134,35 miliar sehingga total belanja menjadi sekitar Rp3,12 triliun. Fraksi menegaskan bahwa kenaikan belanja harus diarahkan untuk program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara nyata, bukan terserap pada belanja administrasi birokrasi yang bersifat konsumtif. Fraksi juga meminta Pemerintah Daerah menjelaskan relevansi pergeseran anggaran terhadap pencapaian 5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026, menyampaikan matriks pencapaian program, serta menjelaskan komponen pembentuk SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp221,11 miliar yang digunakan untuk menutup defisit. Fraksi menekankan agar pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi maksimal, tepat waktu, dan memenuhi indikator sasaran yang telah direncanakan.

Catatan: Pandangan Umum ini dibacakan oleh juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Agung Nur Wahid, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 2 September 2026. Dokumen ditandatangani oleh Sri Khalimah, S.Sos. selaku Ketua Fraksi dan Agung Nur Wahid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fraksi.

Kata Kunci: Pandangan Umum Fraksi; Fraksi PPP; Perubahan APBD; Bina Mental Spiritual; PMI; SiLPA; Belanja Daerah; Prioritas Pembangunan.

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026, GENERAL OPINION OF THE UNITED DEVELOPMENT PARTY FACTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY ON THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING THE AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2026.

This document contains the General Opinion of the United Development Party Faction of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency on the Draft Regional Regulation concerning the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2026. The opinion was delivered at a plenary meeting on 2 September 2026 after the faction reviewed the draft regulation and the financial note submitted by the Regional Government.

The faction expresses concern over the proposed reduction in the budget for spiritual and mental development facilitation, from Rp15,984,000,000.00 to Rp11,723,293,000.00. It argues that sustainable and equitable regional development should place human resource quality and spiritual development as important pillars. The faction therefore requests that the Regional Government and the Budget Committee restore the allocation or cover the reduction through reallocation from less urgent efficiency-based expenditures. The faction also supports stronger synergy, regulatory support, and sustainable budget allocation for the Indonesian Red Cross in Kebumen, particularly for blood donation services, disaster mitigation, and youth volunteer development across the region.

Other main points include the faction's attention to the increase in regional expenditure by Rp134.35 billion, bringing total expenditure to approximately Rp3.12 trillion. The faction emphasizes that the increase should be directed toward programs that significantly stimulate the public economy, rather than being absorbed by consumptive administrative spending. It also requests clarification on the relevance of budget shifts to the achievement of Kebumen Regency's five development priorities for Fiscal Year 2026, asks for a program achievement matrix, and seeks details on the components of the 2025 budget surplus amounting to Rp221.11 billion used to cover the deficit. The faction further emphasizes that both physical and non-physical activities under the revised budget should be implemented optimally, on time, and in line with planned performance indicators.

Note: *This General Opinion was read by the spokesperson of the United Development Party Faction, Agung Nur Wahid, S.H., M.H., at a plenary meeting of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency on 2 September 2026. The document was signed by Sri Khalimah, S.Sos. as Faction Chairperson and Agung Nur Wahid, S.H., M.H. as Faction Secretary.*

Keywords: *General Opinion of Faction; PPP Faction; Revised Regional Budget; Spiritual Development; Indonesian Red Cross; Budget Surplus; Regional Expenditure; Development Priorities.*